

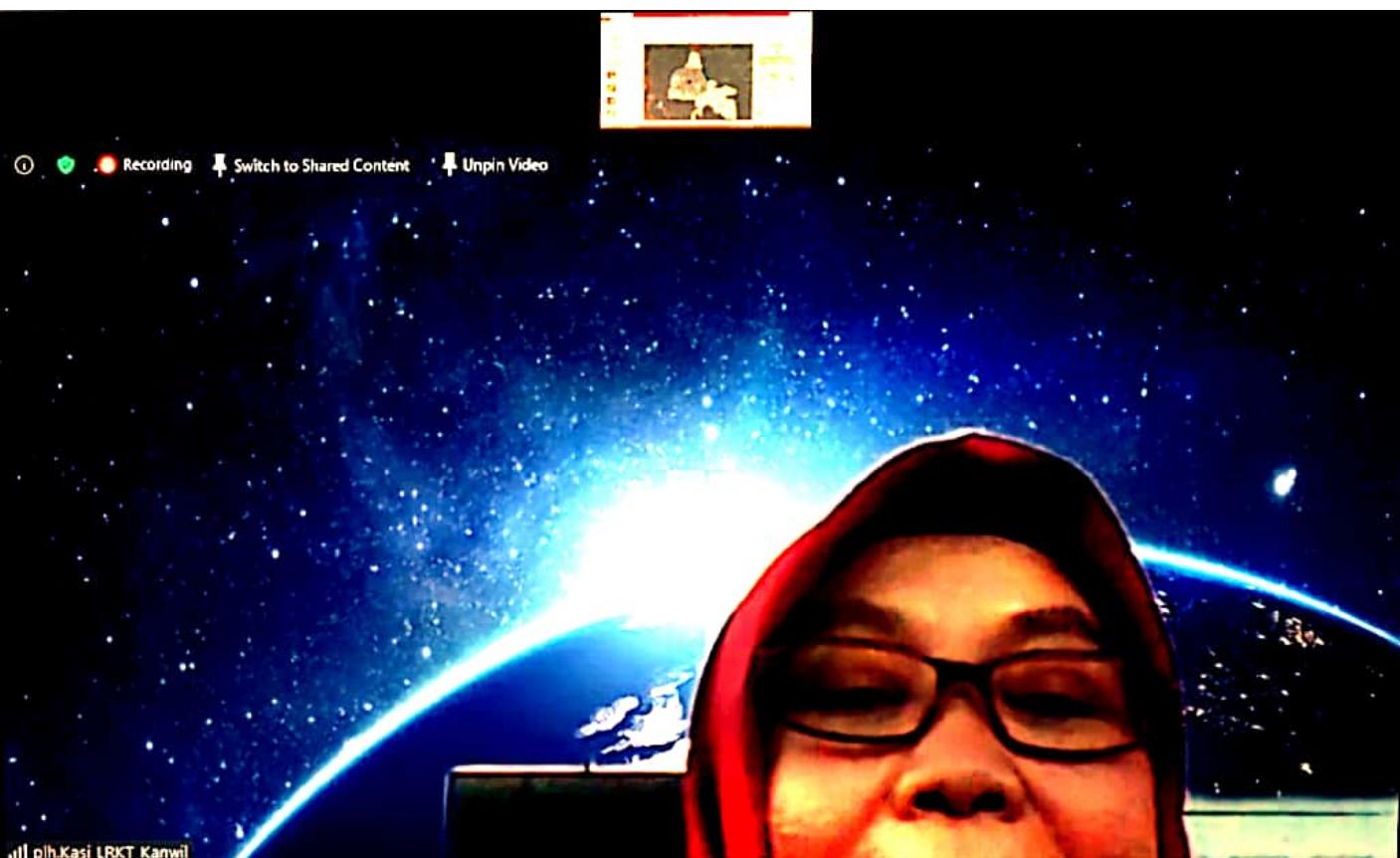
Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

ZOOM Meeting





Dipindai dengan CamScanner

PERMASALAHAN PERTANAHAN PROVINSI JAMBI



NO	LOKASI	TIPOLOGI PERMASALAHAN					DESKRIPSI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN MASALAH
		OKU MASY	T.T PER-USHAAN	TIDAK ADA LAHAN	T.T KWS HUTAN	LAIN LAIN		
1. TEBO								
1.	Sungai Karang Th. Patan : 1993/1994 Jumlah KK : 300 KK Pola : HTI				✓		Lahan masuk ke Kawasan Hutan seluas 75 Ha	<ol style="list-style-type: none"> Pemkab Tebo tahun 2018 telah mengusulkan surat Bupati ke Gubernur dan dari Gubernur ke Kemenko perekonomian untuk pelepasan kawasan hutan melalui obyek TORA, namun hingga saat ini belum ada realisasinya. Dinas yg membidangi ketransmigrasi kabupaten mengirim surat permohonan tindak lanjut kepada Kementerian LHK.
2. SAROLANGUN								
2.	UPT Sei Dingin I Th. Patan : 1996/1997 Jumlah KK : 150 KK Pola : P4HDR				✓		Terindikasi areal tumpang tindih dengan kawasan hutan	Lahan sudah diukur oleh Kantah dan sudah mendapat nomor hak, namun masih menunggu SK Trans Pengganti dari Bupati. Dinas yang membidangi ketransmigrasi agar membuat surat usulan ke Bupati untuk menerbitkan SK Pengganti tersebut.
3.	UPT Sei Dingin II Th. Patan : 2001 Jumlah KK : 300 KK Pola : P4HDR				✓			

KETERANGAN : OKU MASY = Okupasi / Sengketa dgn Masyarakat, TT = Tumpang Tindih, Lain-Lain = Permasalahan di luar 4 tipologi (Okupasi/sengketa dan Pemerintah, Perubahan status lahan, ketidaksesuaian tata batas, Bencana alam)



SISA SEBARAN BEBAN SHM TAHUN 2020 PROVINSI JAMBI

NO.	KABUPATEN	JML. LOKASI	BEBAN TUGAS (BID)
1	Bungo	15	3.921
2	Sorolangun	8	2.032
3	Merangin	7	1.965
4	Muaro Jambi	4	779
5	Kerinci	1	600
6	Tanjung Jabung Timur	3	497
7	Tebo	1	300
8	Batanghari	1	45
TOTAL		40	10.139

Total sebaran beban
SHM di Provinsi
Jambi sebanyak
10.139 bidang yang
tersebar di 8
Kabupaten (40 lokasi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Ditenpktrans.kemendesa.go.id 2 Ditenpktrans.kemendesa 3 DitenPKTrans

BAHAN PAPARAN

RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN
SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) TRANSMIGRASI
PROVINSI JAMBI
OLEH DIREKTUR PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI

JULI 2020

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA